

Diplomasi Lingkungan Indonesia di Era Kepemimpinan Susilo Bambang Yudhoyono. Studi Kasus Kabut Asap Lintas Batas di Asia Tenggara

Muhammad Zulfikar, 2110412039

Hubungan Internasional, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik

Teori dan Analisis Kebijakan Luar Negeri

Latar Belakang

Lingkungan merupakan kebutuhan primer dalam kehidupan manusia dan harus dikelola dan dilestarikan agar keseimbangannya terjaga. Bencana alam, kerusakan dan pencemaran lingkungan telah terjadi di banyak tempat dan menyebabkan dampak langsung bagi kesejahteraan hidup manusia. Oleh karena itu, seiring dengan meningkatnya kesadaran masyarakat global terhadap lingkungan, permasalahan lingkungan sangat krusial untuk diperbincangkan di kancah nasional maupun internasional.

Isu lingkungan menjadi tantangan global yang dialami di seluruh negara di dunia. Berbagai instrumen kerjasama baik bilateral maupun multilateral dilaksanakan sebagai upaya dan sarana dalam menghadapi masalah lingkungan nasional, regional, dan global. Tantangan lingkungan terutama kasus polusi di Indonesia menjadi relevan bagi isu lingkungan regional Asia Tenggara, karena Indonesia sebagai salah satu negara terbesar, memiliki hutan dan perairan yang luas, dan juga memiliki jumlah populasi yang besar, dengan aktifitas industri, kendaraan bermotor, dan jumlah kebakaran hutan yang banyak dibandingkan dengan negara di Asia Tenggara yang lainnya. Faktor-faktor tersebut secara konvensional menjadi sumber polusi dan kabut asap lintas batas regional yang terjadi secara berkala di Asia Tenggara.

Pembahasan

Menurut Simone Borg (1994), Diplomasi Lingkungan dapat diartikan sebagai keahlian dalam menangani isu-isu lingkungan yang berdampak internasional. Keuntungan dari diplomasi ini adalah kondisi lingkungan akan semaksimal mungkin diperbaiki dan dicegah karena adanya masalah lingkungan. Kekurangannya adalah tidak semua negara mau mengurangi aktivitasnya yang berdampak negatif terhadap lingkungan. Dapat disederhanakan bahwa diplomasi lingkungan melibatkan diskusi dan kesepakatan antar negara untuk mengatasi masalah yang berkaitan dengan lingkungan, seperti perubahan iklim, konservasi keanekaragaman hayati, polusi, dan pengelolaan sumber daya alam. Diplomasi lingkungan bertujuan untuk mendorong kerja sama dan konsensus di antara negara-negara untuk menemukan solusi yang berkelanjutan bagi tantangan lingkungan yang dihadapi bersama.

Indonesia menjadi salah satu negara yang menjadi sumber tercemarnya polusi dan kabut asap di Asia Tenggara, yang penyebab utamanya adalah kebakaran hutan dan lahan. Terdapat setidaknya sepuluh kali kebakaran hutan dan lahan yang cukup besar terjadi di sejumlah area di Pulau Kalimantan dan Sumatera dengan akumulasi seluas 526.945 hektar pada interval periode 1997-2006. Kebakaran yang paling besar yaitu pada 1997 yang membakar 263.991 hektar atau sekitar setengah dari jumlah seluruh lahan hutan di Indonesia. (Clapp dan Dauvergne, 2005: 102).

Menurut Schweithelm dan Jessup (1999), Indonesia mengalami kerugian yang cukup besar yaitu hampir \$4 milyar sebagai akibat dari kebakaran hutan dan polusi kabut asap pada tahun 1997. Industri kayu, pertanian, perkebunan, hasil hutan, keanekaragaman hayati, emisi karbon, biaya pemadaman kebakaran, kesehatan, transportasi, dan pariwisata merupakan beberapa industri yang mengalami kerugian. Selain

Indonesia, negara-negara lain juga mengalami dampaknya, dengan Singapura dan Malaysia mengalami proyeksi kerugian ekonomi masing-masing sebesar lebih dari 69 juta dan 321 juta USD (Schweithelm dan Jessup, 1999).

Selain kerugian ekonomi, dampak kebakaran berupa kontaminasi kabut asap juga dapat dirasakan langsung oleh beberapa negara di Asia Tenggara. Kesehatan masyarakat dapat terkena dampak negatif dari asap tebal dari kebakaran hutan, terutama gangguan pernapasan dan infeksi saluran pernapasan atas (ISPA). Selain itu, akibat buruknya penglihatan yang disebabkan oleh asap kebakaran hutan, lalu lintas udara, darat, dan laut juga terhambat. Asap dari kebakaran hutan di Indonesia telah berdampak pada negara-negara di luar Indonesia, termasuk Singapura dan Malaysia (Kementerian Luar Negeri, 2016).

Kebakaran hutan juga menyebabkan degradasi hutan yang sangat sulit untuk mengembalikan hutan yang terbakar secara ekstensif ke kondisi semula. Kebakaran hutan dapat menurunkan kualitas tanah. Penurunan kualitas tanah ini membuat tanah menjadi mudah tererosi dan meningkatkan risiko banjir. (Saragih, 2017).

Prihatin dengan masalah kabut asap yang semakin memburuk dari waktu ke waktu, pemerintah Singapura menulis surat diplomatik kepada Kementerian Luar Negeri Indonesia (Nguitrage, 2014:71). Pemerintah Singapura kemudian membuat pengumuman publik pada tahun 2003 yang menyatakan bahwa Indonesia bukan merupakan bagian dari forum komunikasi yang telah dibentuk Singapura dengan Malaysia dan Brunei terkait masalah kabut asap (Varkkey, 2012:80-82).

Presiden Susilo Bambang Yudhoyono menyatakan penyesalannya dan berjanji bahwa pemerintah akan menangani masalah kabut asap ini dengan lebih serius dengan mengerahkan seluruh sumber daya yang dimilikinya untuk memadamkan api. Pemerintah akan mengerahkan anggota TNI dan Polri serta menyewa pesawat khusus pemadam kebakaran. (Amrullah, 2006). SBY: "Ini akan diselesaikan dalam beberapa jam ke depan. Kita akan menyewa pesawat yang sedang kita koordinasikan dengan Rusia, pesawat Ilusyn dengan tipe yang tepat, atau pesawat lain yang bisa membawa berton-ton air untuk dijatuhkan di titik-titik api yang banyak mengeluarkan asap."

Dalam sebuah surat yang dipublikasikan ke media pada tahun 2006, Perdana Menteri Singapura Lee Hsien Loong juga menyampaikan ketidaksenangannya kepada Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. Menyikapi hal tersebut, surat balasan segera dikirim oleh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono yang meminta maaf kepada pemerintah Singapura dan Malaysia (Kompas, 2006:6).

Ketegangan diplomatik meningkat etika Singapura mengangkat isu kabut asap di Majelis Umum PBB pada akhir 2006, mengadvokasi upaya yang lebih besar yang mencakup bantuan internasional untuk mengatasi masalah kabut asap di Indonesia. Susilo Bambang Yudhoyono menunjukkan kekesalannya dengan tidak menjabat tangan dengan Presiden Singapura kala itu (Deutsche Welle, 2006:13). Indonesia menganggap tindakan Singapura yang mengangkat isu kebakaran hutan dan polusi udara ke Majelis Umum PBB telah melanggar prinsip non-intervensi ASEAN. Aditya Widi Adiwoso Asmady, duta besar Indonesia untuk PBB periode 2004-2008 mengatakan dalam wawancara oleh Helena Berkkey, "Masalah ini adalah masalah domestik Indonesia, dan tindakan tersebut tidak dapat diterima dan merupakan campur tangan dalam kedaulatan dan urusan dalam negeri Indonesia. Menurut saya, mereka telah menyalahgunakan tempat di PBB untuk mempermalukan Indonesia. Keputusan pertemuan ASEAN untuk menangani masalah ini secara bilateral dan di tingkat ASEAN adalah keputusan yang seharusnya dihormati Singapura (Varkkey, 2011: 95).

Presiden Susilo Bambang Yudhoyono menyatakan kemarahan Indonesia atas tindakan Singapura dengan memanggil duta besar Singapura ke Jakarta dan dengan tidak ikut serta dalam diskusi bilateral mengenai zona ekonomi khusus yang diusulkan oleh kedua negara (Varkkey, 2012:78). Selain itu,

Indonesia menyatakan bahwa penambangan pasir di pulau-pulau di Indonesia telah sangat merusak lingkungan dan melarang ekspor pasir Indonesia ke Singapura. Agung Laksono, Menteri Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat periode 2010-2014, setuju bahwa Indonesia tidak membutuhkan bantuan dari negara lain untuk mengatasi dampak kebakaran hutan (Kompas, 2006:14).

Diplomasi lingkungan hidup Indonesia mengalami dinamika baru di bawah pemerintahan SBY. Baik di tingkat global maupun nasional, beberapa kebijakan diimplementasikan untuk memperbaiki dan menghindari kerusakan lingkungan. Kesepakatan-kesepakatan lingkungan global seperti Perjanjian Paris dan Protokol Kyoto berdampak pada rekonstruksi diplomasi lingkungan Indonesia (Elliot, 2003:33). Bersama dengan negara-negara berkembang, Indonesia mengkampanyekan hak atas pembangunan ekonomi dan dukungan finansial untuk memerangi perubahan iklim global dari negara-negara industri.

Masalah-masalah lingkungan yang terjadi menjadi titik balik bagi Indonesia dalam merumuskan kembali konsep diplomasi lingkungan Indonesia. Pengelolaan hutan berdasarkan kebutuhan masyarakat lokal dan pelestarian lingkungan berubah dari sebuah masalah menjadi prioritas utama di Indonesia. Pada masa pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono, Indonesia sangat aktif dalam berbagai forum perundingan lingkungan multilateral seperti pertemuan UNFCCC 13 pada tahun 2007 di Bali, Denpasar. Pertemuan ini menciptakan Bali Action Plan, meratifikasi AATHP atau ASEAN Agreement on Transboundary Haze Pollution, mendeklarasikan penghentian konversi hutan, dan memberlakukan pakta kerja sama REDD+ dengan Norwegia. Selain itu, berbagai kebijakan dalam negeri telah diambil untuk menekan laju deforestasi dan degradasi lingkungan. Indonesia meratifikasi dan memberlakukan AATHP meskipun mendapat tentangan dari anggota parlemen (Nguitragool, 2014:3-4). AATHP merupakan kerangka kerja untuk mengurangi polusi udara di ASEAN.

Mengingat bahwa Indonesia adalah negara dengan wilayah hutan terbesar di dunia, pemerintah memiliki modal yang cukup besar dalam diplomasi lingkungan. Susilo Bambang Yudhoyono, yang menjabat sebagai presiden Republik Indonesia dari tahun 2004 hingga 2014, mengatakan bahwa pada tahun 2030, hutan Indonesia harus bergeser dari penghasil emisi menjadi penyerap emisi (Cronin dan Santoso, 2010: 4-5).

Presiden Susilo Bambang Yudhoyono mengeluarkan Instruksi Presiden No. 10/2011 tentang Penundaan Pemberian Izin Baru dan Penyempurnaan Tata Kelola Hutan Alam Primer dan Lahan Gambut, yang memperjelas bahwa pemerintah Indonesia sangat serius dalam pengelolaan hutan lestari. Semua tingkat pemerintahan, dari pusat hingga daerah, kini dilarang memberikan izin untuk segala jenis eksploitasi hutan, termasuk perkebunan dan pertambangan di hutan primer dan lahan gambut (Cronin dan Santoso, 2010: 99).

James Barber mengategorikan gaya pemimpin berdasarkan jumlah usaha yang dicurahkan dalam pekerjaan mereka dan tingkat kepuasan yang mereka dapatkan dari posisi mereka, yaitu pemimpin aktif-negatif, aktif-positif, pasif-negatif, dan pasif-positif. Presiden Susilo Bambang Yudhoyono memiliki model atau gaya kepemimpinan dengan ciri-ciri moderat yang mengutamakan intelektualitas, keterbukaan, sistematis, tuntutan keberhasilan, antikritik, dan mempertahankan otoritas dalam menjalankan kekuasaan. Susilo Bambang Yudhoyono sebagai Presiden Indonesia menunjukkan kebijakan luar negeri yang proaktif dan ditandai dengan politik luar negeri yang tinggi dan berusaha membuat Indonesia terlibat dalam ranah politik global. (Widiatmaja dan Albab, 2019).

Menurut Alex Mintz, peran kepribadian dalam kebijakan luar negeri mencakup proses kognitif, latar belakang, karakteristik pribadi, motif, dan keyakinan, dan mengasumsikan bahwa pengambilan keputusan merupakan hasil dari 'keagenan manusia' individu. Kepribadian Susilo Bambang Yudhoyono tidak dapat dipisahkan dari kepemimpinannya yang bersifat akomodatif. Ahmad Mubarak (wawancara, 5

Maret 2015) menegaskan bahwa SBY lebih merupakan seorang soft power daripada hard power, yang berarti bahwa keputusan-keputusan politiknya didasarkan pada pemikiran dan perencanaan yang matang dan tidak suka konflik. (Triwahyuningsih dan Darajat, 2017)

Referensi

- Widiatmaja, Aji., Albab, Ulul. (2019). Indonesia under Susilo Bambang Yudhoyono and Joko Widodo: Foreign Policy in the Middle of Regional Strategic Environment Dynamics. *Jurnal Politica Dinamika Masalah Politik Dalam Negeri dan Hubungan Internasional*.
- Sinaga, O., Yani, Y. M., Siahaan, V. R. (2018). *DIPLOMASI LINGKUNGAN INDONESIA ANTARA ASA DAN REALITA*. UKI Press.
- Saragih, Y. M. (2017). Prinsip Pertanggungjawaban Negara terhadap Pencemaran Udara Lintas Batas Akibat Kebakaran Hutan Indonesia menurut Asean Agreement on Transboundary Haze Pollution. *Pandecta*. Volume 12. Nomor 1. June 2017.
- Amrullah, Z. (2006). SBY Minta Maaf Kasus Kebakaran Hutan. DW. <https://amp.dw.com/id/sby-minta-maaf-kasus-kebakaran-hutan/a-2935210>
- Elliott, Lorainne. (2003). "ASEAN and Environmental Cooperation: norms, interests and identity." *The Pacific Review* 16 (1): 29-52.
- Clapp, Jennifer, Dauvergne, Peter. (2005). *Path to a Green World: the Political Economy of Global Environment*. Masschusets: MIT Press.
- Barber, James. D. (1992) *The Presidential Character: Predicting performance in the White House*, (third edition), Englewood Cliffs, NJ: Prentice Hill.
- Triwahyuningsih, Darajat, Abdurrahman. (2017). *Hubungan Eksekutif-Legislatif 2009–2014*. Tiara Wacana.
- Cronin, Tim, Santoso, Levania. (2010). *REDD+ Politics in the Media: A Case Study from Indonesia*. Bogor: CIFOR.
- Kementerian Luar Negeri RI. (2016). *Kerjasama Fungsional ASEAN*.
- Varkkey, H. M. (2011). "Addressing Transboundary Haze through ASEAN: Singapore's Normative Constraints." *Journal of International Studies* 83-101.
- Varkkey, H. M. (2012). "The ASEAN Way and Haze Mitigation Efforts." *Journal of International Studies* 8: 77-97.